

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI SEBAGAI BAGIAN DARI PERWUJUDAN KETAHANAN NASIONAL

Dr. A. DIRWAN, M.Sc.
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)

Abstrak

Sistem Nasional Indonesia, secara terus-menerus menerima dampak lingkungan, sehingga diperlukan pengayaan sepanjang waktu, yang menyebabkan sistem tersebut bersifat dinamis. Tingkat sistem kehidupan nasional dalam kurun waktu tertentu, adalah kemampuan bangsa (power) yang diistilahkan dengan ketahanan nasional. Kemampuan nasional sebagai ketahanan nasional, merupakan integrasi segenap aspek kehidupan nasional yang tertuang dalam aspek Ipoleksosbud Hankam.

Pasang surut perjalanan kehidupan bangsa Indonesia dapat dilihat dari menurunnya ketahanan pangan dan energi, akibat tidak terpolanya pengelolaan sumber daya yang tersedia. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, Indonesia yang merupakan Negara agraris sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terlihat dari kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Di sisi lain dalam ketahanan energi, Indonesia telah menjadi sebagai salah satu negara peng-impor bahan bakar minyak. Harga minyak dunia yang meroket, memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan subsidi dalam menjaga kesetabilan ekonomi. Namun kebijakan ini menyebabkan anggaran pemerintah membengkak. Eksploitasi sumber daya alam lainnya hampir tidak terkendali dan telah merusak lingkungan, tanpa ada upaya rehabilitasi pasca tambang. Untuk itu diperlukan kebijakan terpadu dan pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pendahuluan

Nilai luhur Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang dituangkan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, berbunyi, "Bumi, air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Negara yang berdasarkan Pancasila dinilai belum mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan baru dinikmati oleh sebagian kecil kelompok tertentu, sehingga ada keraguan dalam implementasi nilai-nilai luhur bangsa. Para penyelenggara negara belum dapat memberikan teladan secara

nyata dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai bangsa. Bahkan terdapat penyelenggara negara yang bersikap dan bertingkah laku tidak bertanggung jawab, dengan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pasang surut perjalanan kehidupan bangsa Indonesia tersebut, antara lain dapat dilihat dari menurunnya ketahanan pangan dan energi, akibat tidak terpolanya pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Dalam perkembangan akhir-akhir ini, Indonesia yang merupakan Negara agraris sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terlihat dari

kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras. Namun kebijakan pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi Bulog sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah untuk menangani masalah pangan, meng-impor beras, karena cadangan beras tidak mencukupi. Di sisi lain penduduk Indonesia yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani merasa dirugikan karena harga beras petani sangat rendah, belum dapat meningkatkan kesejahteraan, sehingga petani masih berada dibawah garis kemiskinan.

Dalam ketahanan energi, Indonesia telah menjadi sebagai salah satu negara peng-impor bahan bakar minyak. Harga minyak dunia yang meroket, memaksa pemerintah untuk mengambil kebijakan subsidi dalam menjaga kesetabilan ekonomi. Namun kebijakan ini menyebabkan anggaran pemerintah membengkak. Eksploitasi sumber daya alam lainnya hampir tidak terkendali dan telah merusak lingkungan, tanpa ada upaya rehabilitasi pasca tambang. Seperti ekspor batu bara yang berlebihan akan menguras sumber energi dalam waktu singkat dan hanya akan menguntungkan pihak luar negeri. Kondisi ini menyebabkan akan mengurangi Ketahanan energi nasional secara keseluruhan.

Sistem nasional di atas, secara terus-menerus menerima dampak lingkungan, sehingga kondisinya berubah-ubah sepanjang waktu, yang menyebabkan sistem kehidupan nasional bersifat dinamis. Tingkat sistem kehidupan nasional dalam kurun waktu tertentu, adalah kemampuan bangsa (*power*) yang diistilahkan dengan ketahanan nasional. Kemampuan nasional sebagai ketahanan nasional, merupakan integrasi segenap aspek kehidupan nasional yang tertuang dalam aspek Ipoleksosbud Hankam.

Sistem di atas juga diperparah oleh menurunnya akhlak, etika dan moral, serta korupsi dan penegakkan hukum yang masih seperti menegakkan benang basah. Gerakan reformasi telah berjalan beberapa puluh tahun, disinyalir telah menyimpang dari tujuan semula, seperti konsep HAM dan demokrasi yang diartikan sebagai kebebasan mutlak, berkembang sentimen kedaerahan dan primordialisme, muncul gejala disintegrasi bangsa baik yang bersifat wacana maupun terorganisasi.

Analisis singkat ini mencoba membahas bagaimana pengaruh ketahanan pangan dan energi terhadap ketahanan nasional.

Ketahanan Nasional

Bangsa Indonesia telah mengatur dirinya dalam suatu kehidupan, yang ditata melalui sistem manajemen nasional (Sismennas), antara lain menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang tersusun secara sistematis, berwujud dari rangkaian fungsi-fungsi utama penyelenggaraan kehidupan bernegara di bidang Ipoleksosbud Hankam. Aspek-aspek kehidupan nasional sesuai dengan pola pemikiran kesisteman yang dianut dalam ketahanan nasional, merupakan sinergitas atau keterpaduan dari segenap aspek kehidupan tersebut. Dengan demikian perlu dipastikan apakah ketahanan nasional sebagai kemampuan bangsa, yang dihasilkan melalui pembangunan nasional telah benar-benar memiliki kemampuan yang diinginkan. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kakuatan nasional

dalam mengatasi setiap ancaman.¹ Tangguh adalah kemampuan dan kekuatan menanggung beban, kuat menahan penderita, dan ulet dalam usaha yang terus menerus. Ulet adalah kemauan yang keras, tidak kenal menyerah, yakin dan percaya pada kekuatan diri sendiri. Makin tinggi ketahanan nasional suatu bangsa makin tinggi pula kualitasnya dan semakin kuat posisinya, baik keluar maupun kedalam. Bangsa Indonesia menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan bangsa harus diselenggarakan secara terpadu, sehingga akan menghasilkan suatu sinergi kemampuan yang berupa peningkatan ketahanan seluruh aspek kehidupan bangsa termasuk ketahanan pangan dan energi, secara selaras, serasi dan seimbang.

Berdasarkan pengertian konsepsi ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan, dirumuskan secara sistematis dari Trigatra (tiga aspek alamiah) dan Pancagatra (lima aspek sosial).² Kondisi dari kedelapan aspek tersebut, di tinjau dari tingkat ketahanan nasional, belum sesuai dengan yang diharapkan.

Trigatra, merupakan aspek-aspek suatu negara yang memang sudah melekat pada negara tersebut. Oleh karena itu unsur-unsurnya tidak pernah sama bagi setiap negara. Trigatra meliputi, geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, yang mengandung unsur-unsur bersifat relatif tetap. **Pertama**; Geografi. Geografi suatu negara adalah sesuatu yang ada di permukaan bumi, yang memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah kedalam maupun keluar. Bentuk kedalam menampakkan corak, wujud, isi dan

tata susunan wilayah negara. Geografi sebagai kesatuan wilayah negara merupakan wadah dan ruang hidup bangsa. Bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan serta hubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Baik bentuk kedalam maupun keluar geografi merupakan wadah dan ruang hidup bagi bangsa yang mendiaminya, serta menentukan wujud, isi dan kehidupan, yang dapat mempengaruhi lingkungannya.

Kedua; Kekayaan alam. Kekayaan alam negara adalah segala sumber daya dan potensi alam yang terdapat di lingkungan ruang angkasa, atmosfer, permukaan bumi (daratan dan lautan) dan di dalam bumi yang berada di wilayah kekuasaan/yurisdiksinya. Kekayaan alam menurut jenisnya dibedakan dalam, Hewani (Fauna), Nabati (Flora), Mineral (minyak bumi, biji besi, batubara dan lain-lain), Tanah (tempat tinggal, tempat berpijak, tempat bercocok tanam), Udara (sinar matahari, oksigen, karbondioksida), Ruang angkasa, Energi alam (gas alam, panas alam, air artthesis), serta Air dan Lautan. Setiap bangsa berusaha memperoleh sumber daya alam yang diperlukan termasuk sebagai sumber energi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta sebagai salah satu fungsi kemanusiaan, yang harus digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna. **Ketiga**; Kependudukan. Penduduk adalah manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Tinjauan masalah kependudukan umumnya, dikaitkan dengan pencapaian tingkat kesejahteraan dan keamanan, antara lain, jumlah, komposisi, persebaran dan kualitas penduduk, serta faktor yang mempengaruhi dan perkembangannya.

Pancagatra. Aspek sosial dalam ketahanan nasional lebih bersifat

¹ Lemhannas RI, Modul 1: Ketahanan Nasional (Jakarta,2008), p.3.

² Departemen Pertahanan, Stabilitas Nasional Dinamis di Indonesia (Jakarta,1998), p.7.

dinamis. **Pertama;** Ketahanan Ideologi. Suatu bangsa memerlukan falsafah sebagai landasan bagi kelangsungan hidupnya, yang sekaligus berfungsi sebagai dasar dan cita-cita atau tujuan nasional yang hendak dicapai. Ideologi diartikan sebagai perangkat prinsip pengarahan (*guiding principles*) yang dijadikan dasar serta arah dan tujuan untuk dicapai di dalam melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional suatu bangsa. Sesuai dengan pengertian ketahanan di bidang ideologi, maka ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik. Kemampuan suatu ideologi bergantung kepada rangkaian nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia baik secara pribadi makhluk sosial, maupun sebagai warga negara sesuai kodrat dan irodad-Nya. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dikembangkan nilai instrumentalnya, agar tetap mampu mengadaptasi nilai baru dan menolak nilai yang tidak sesuai, serta membimbing dan mengarahkan kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, selaras dengan peradaban dunia yang berubah dengan cepat. **Kedua;** Ketahanan Politik. Politik dalam ilmu pengetahuan senantiasa dihubungkan dengan kekuasaan atau kekuatan yang menjadi pusat perhatiannya. Masalah kekuasaan didalam suatu negara berpusat pada pemerintah negara tersebut. Kehidupan politik bertumpu pada dua sektor penting yaitu, sektor pemerintah dan sektor non pemerintah. Sektor non pemerintah berfungsi memberi masukan berwujud, pernyataan, keinginan, dan tuntutan rakyat. Sedangkan pemerintah berfungsi mengeluarkan ketentuan, antara lain menentukan kebijakan umum yang bersifat

keputusan politik. Pada suatu negara yang berasas demokrasi, hal tersebut merupakan aspek yang sangat menentukan di dalam kehidupan berpolitik. Persoalan utama adalah bagaimana kebijakan pemerintah, selalu sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat, namun tetap mengarah kepada pencapaian tujuan nasional. **Ketiga;** Ketahanan Ekonomi. Berbagai permasalahan di bidang ekonomi, antara lain pelaksanaan demokrasi ekonomi belum sepenuhnya sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial si kaya dan si miskin, ketimpangan pembangunan wilayah barat dengan wilayah timur, serta kesenjangan pembangunan sektor pertanian dengan pembangunan sektor industri, yang pada gilirannya akan memperlemah tatanan dan daya tahan perekonomian. Dengan demikian syarat stabilitas ekonomi perlu disiapkan agar mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan antar wilayah, sektor, golongan dan individu, serta sekaligus menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, yang mampu mendukung berkembang kehidupan Ipoleksosbud Hankam secara berlanjut. **Keempat;** Ketahanan Sosial Budaya. Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai antara lain tingkat pendidikan dan disiplin serta etos kerja yang rendah, penguasaan Iptek yang masih lemah. Keanekaragaman suku, agama, bahasa dan adat istiadat, serta aparat negara yang masih kurang berkualitas, apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerawanan. Agar mampu menjunjung tinggi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu mengendalikan gaya-gaya *sentrifugal* dan *sentripetal* yang bekerja dalam masyarakat, maka stabilitas sosial budaya perlu

dimantapkan. **Kelima;** Pertahanan Keamanan. Berbagai permasalahan di bidang Hankam, antara lain penghayatan terhadap upaya bela negara dalam rangka Sishankamrata, belum sepenuhnya dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kerawanan di bidang Hankam. Oleh karena itu stabilitas Hankam perlu diupayakan, agar sistem pertahanan keamanan negara, mampu melindungi kesatuan dan keutuhan wilayah, serta sanggup menghadapi setiap ancaman, atas dasar kepercayaan dan kekuatan pada diri sendiri serta pemanfaatan seluruh potensi nasional secara optimal.

Dari keseluruhan aspek kehidupan tersebut, dalam konteks ketahanan nasional, memerlukan persatuan dan kesatuan yang mensyaratkan adanya persamaan hak diantara kelompok-kelompok yang diajak bersatu. Artinya masih ada ruang kebebasan yang dimiliki, sekalipun sebagian besar diserahkan berupa *social contract*, yang terumuskan lewat konstitusi negara dan konvensi bernegara. Model Negara Kesatuan, tanpa melihat aspirasi masyarakat akan mudah terjebak kepada negara diktator. Apalagi Indonesia menghadapi berbagai masalah yang membutuhkan penanganan secara khusus, antara lain memberi kelayakan hidup minimal termasuk pangan kepada warga negara. Kewajiban penyelenggara negara memenuhi kebutuhan tersebut, mengingat penyelenggara negara sudah diberi hak untuk memanfaatkan kekayaan alam, yang digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Ketahanan Pangan dan Energi

Kebijakan dibidang Pangan sesuai UU No. 7 tahun 1996 yang merupakan UU Pangan pertama sejak

Indonesia merdeka dalam konsiderannya menempatkan pangan sebagai komoditas dagang, untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak asasi manusia.

Pengertian Ketahanan Pangan adalah "Kondisi dimana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari kecukupan pangan dalam hal jumlah dan kualitas dan juga adanya jaminan atas keamanan (*safety*), distribusi yang merata dan kemampuan membeli".

Krisis pada tahun 1997-1998 yang bersamaan dengan kegagalan produksi pangan, sehingga melahirkan berbagai keadaan rawan pangan bahkan kurang gizi yang berat. Pada awal tahun 2000, kita digoncangkan oleh mulai naiknya harga minyak bumi yang melampaui batas US \$90,-/barel yang mendorong ekspansi besar-besaran produksi bio energi. Hal ini telah menimbulkan ketakutan akan semakin sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan, karena adanya prioritas menanam biji-bijian untuk kebutuhan energi.

Ketahanan Pangan dalam perspektif Undang-Undang No. 7 tahun 1996, mempunyai beberapa dimensi penting yakni ketersediaan, mutu dan keamanan pangan. Salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ketahanan pangan suatu negara adalah melalui angka rata-rata kesediaan pangan. Mengingat keragaman pangan adalah merupakan bagian penting dari mutu pangan serta keragaman budaya dan status sosial ekonomi rumah tangga atau masyarakat, maka terjadi keanekaan pula dalam konsumsi bahan makanan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong ASEAN segera menyelesaikan kerja sama ketahanan pangan. Caranya, dengan memformulasikan sistem cadangan pangan bersama. Hal ini

disampaikan dalam rangka kerjasama kawasan dalam ketahanan pangan dalam menghadapi harga pangan yang tinggi. Untuk menghadapi kondisi harga pangan saat ini perlu segera menyelesaikan kerangka ketahanan pangan terintegrasi. "Di antaranya kerja sama dalam penelitian, pengembangan investasi, dan pengembangan pangan," (Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke - 18 ASEAN, Mei 2011, Jakarta). Masalah harga pangan dunia harus diantisipasi dengan serius, karena kenaikan harga pangan dan dibarengi dengan kenaikan harga energi akan langsung menaikkan jumlah penduduk miskin.

Akibat dari tingginya harga pangan terutama beras dapat berakibat sistemik terhadap yang lain. Kenaikan harga pangan, biasanya diikuti reaksi berantai kenaikan harga barang-barang lain. Kenaikan harga pangan mengakibatkan ancaman kelaparan yang langsung mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Orang yang lapar dapat berbuat apa saja, sehingga akan menurunkan ketahanan nasional.

Di sisi lain sumber energi seperti batubara belum dapat di olah di dalam negeri menjadi produk bernilai tambah, karena belum ada teknologi yang mendukungnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, pada tahun 2011 cadangan Batubara Indonesia mencapai 28 miliar ton. Beberapa jenis tambang mineral utama lainnya memiliki cadangan yang jauh lebih rendah, Nikel tercatat tinggal 21 juta ton, tembaga hanya 27,2 juta ton, bauksit tinggal 100 juta ton, dan logam timah tersisa cadangannya 897.000 ton. Dari 18 teknologi peningkatan kalori dan pemanfaatan batubara di dalam dan luar negeri yang sudah diidentifikasi sejak tahun 2011, tak

satupun yang siap dipakai di Indonesia (MI,2-6-2012).

Atas dasar tersebut, kita harus berupaya untuk mencari bentuk peningkatan nilai batubara. Caranya antara lain mencari jalan agar batubara padat dapat dikonversi menjadi zat cair, sehingga bisa dijadikan energi baru untuk transportasi. Namun kecenderungan pemakaian batubara di dalam negeri terus menurun, sedangkan yang diekspor meningkat. Angka kewajiban memasok kebutuhan batubara dalam negeri yang seharusnya mencapai 24,72 persen dari total produksi nasional, turun menjadi 17 persen. Sementara itu, ekspor batubara yang pada awalnya diproyeksikan 260 juta ton pada tahun 2011, malah melonjak menjadi 340 juta ton. Batubara merupakan satu-satunya sumber daya alam selain minyak yang kandungan karbonnya terbesar sehingga bisa menjadi bahan bakar. Rendahnya penggunaan batubara dalam negeri, menyebabkan peran batubara sebagai pendorong ekonomi (melalui pembangkit listrik tenaga uap yang menggerakkan industri) sangat minim. Keadaan ini memerlukan pengkajian penting, dalam menentukan penggunaan batubara ke depan, sebagai salah satu bagian dari ketahanan energi.

Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi dalam kerangka Ketahanan Nasional

Pemerintah dan legislatif di pusat serta daerah, harus sungguh-sungguh menjalankan kebijakan ekonomi dan sosial, yang berorientasi pada rakyat banyak dan tidak hanya mengutamakan kepentingan segolongan kecil elit masyarakat. Kebijakan ekonomi termasuk pangan, harus diarahkan mencapai tujuan, yaitu rakyat sejahtera. Perdebatan tentang teori ekonomi dengan

berbagai mazhabnya harus dikurangi atau ditiadakan, digantikan dengan semangat memperoleh manfaat nyata dalam usaha membuat rakyat sejahtera. Diusahakan langkah demi langkah, agar mayoritas bangsa menjadi golongan menengah yang penghasilannya cukup tinggi, sedangkan golongan miskin makin berkurang, serta terciptanya kepedulian golongan kaya (*super rich*) kepada sesama.

Usaha mencapai ketahanan pangan bagi seluruh rakyat, di samping memerlukan kebijakan ekonomi yang tepat dan penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) yang bersih, juga memerlukan kegiatan rakyat yang penuh kreativitas dan semangat juang yang tinggi, untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan. Harus dihapuskan kecenderungan menjadi manusia manja mental, karena pengaruh kemudahan alam dan lingkungan yang dimiliki manusia Indonesia. Manusia Indonesia tidak boleh kalah bersaing dari manusia di negara yang tanahnya hanya sedikit dapat ditanami, memiliki potensi sumber alam terbatas, seperti minyak dan gas bumi, dan menghadapi tantangan cuaca yang berat di setiap musim. Dengan niat yang bulat dan semangat juang yang tinggi manusia Indonesia akan dapat memanfaatkan secara maksimal segala kemurahan yang dilimpahkan Tuhan YME, untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Di samping itu dapat memelihara alam lingkungannya, agar dapat secara berlanjut memberikan sumber bagi penciptaan kehidupan yang maju dan sejahtera. Dengan demikian segala potensi negara dan bangsa bermanfaat bagi rakyat Indonesia dan bukannya menjadikan bangsa lain sejahtera, sedangkan rakyat Indonesia tetap miskin. Hal tersebut amat

penting untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

Peningkatan kualitas pendidikan meliputi pendidikan dalam keluarga, pendidikan sekolah maupun pendidikan dalam masyarakat. Harus disadari bahwa masa depan bangsa sangat tergantung pada pendidikan yang dilakukan. Semua orang tua wajib menjalankan pendidikan yang baik dalam lingkungan keluarga, karena itu menjadi landasan bagi setiap manusia Indonesia bagi perkembangan hidup selanjutnya. Pendidikan sekolah harus dilakukan dengan baik, yang berawal dari pembentukan budi pekerti dan karakter, dimulai dari lingkungan keluarga, disamping menumbuhkan pemahaman dan kecakapan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini akan menjadikan anak Indonesia berkembang menjadi manusia yang dapat hidup secara mandiri dan menentukan langkah-langkahnya, untuk membangun kehidupan yang makin maju, serta bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat dan bangsanya. Hanya orang yang berilmu yang dapat mengolah sumber daya untuk menciptakan ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian manusia Indonesia, disatu pihak menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya pada alam modern dan arus globalisasi ini, dipihak lain sadar akan kebangsaannya sebagai faktor penting dalam hidup. Mereka akan selalu mengusahakan yang terbaik bagi bangsanya, karena hal tersebut juga bermanfaat bagi dirinya. Untuk semua itu perlu disediakan dana dan fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan pendidikan yang baik. Perkembangan rakyat sejahtera adalah amat penting karena hanya rakyat sejahtera yang dapat menghasilkan negara kuat. Hanya rakyat sejahtera yang dapat menyediakan *revenue* atau

pemasukan bagi negara, untuk membiayai pendidikan secara memadai.

Upaya lain yang harus dilakukan adalah mengajak partisipasi masyarakat dalam menciptakan persatuan bangsa dan ketahanan nasional. **Pertama;** Mewujudkan kesadaran kebangsaan Indonesia dalam wadah NKRI. **Kedua;** Meningkatkan kesadaran bela negara, antara lain dengan mewaspadaikan oknum subversif dan provokator serta pelaku kriminal. **Ketiga;** Pengawasan sosial terhadap kinerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penutup

Kesimpulan. Sebagai bagian akhir tulisan ini akan disampaikan beberapa kesimpulan :

- a. Pembenahan kehidupan dalam meningkatkan ketahanan nasional di segala aspek perlu dilakukan, termasuk di level daerah. Proses transparansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sangat diperlukan, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya dan penyusunan peraturan. Dengan upaya tersebut peningkatan ketahanan dalam seluruh aspek termasuk pangan dan energi dengan sendirinya menjadi kehendak masyarakat, sehingga masyarakat juga menjadi garda depan dan menjadi mata rantai ketahanan nasional.
- b. Dengan memprioritaskan kesejahteraan yang berkeadilan, berbagai gangguan sosial yang sering timbul karena kehidupan rakyat yang miskin dan menderita, akan berkurang. Diharapkan

kita akan semakin mampu menghadapi globalisasi dengan segala dinamikanya, serta segala dampak positif dan negatifnya, tanpa mengalami kerugian bagi negara dan bangsa. Dengan demikian bangsa Indonesia semakin maju dan sejahtera, serta Negara Republik Indonesia semakin kokoh eksistensinya dan mampu mengembangkan peran yang positif dalam kehidupan umat manusia, sehingga ketahanan nasional semakin mantap.

- c. Mensinergikan kemauan yang kuat untuk merapatkan barisan dan bergerak maju, menuju pencapaian tujuan pembangunan Nasional yang diharapkan. Hal yang paling penting adanya kemauan dari seluruh komponen bangsa, terutama para pemimpinnya, untuk mengimplementasikan konsep ketahanan dalam segala aspek dinamika kehidupan berbangsa secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Saran. Sebagai penutup dari tulisan ini disampaikan beberapa saran:

- a. Pemerintah harus bersungguh-sungguh menggunakan produk dalam negeri, terutama produk pangan.
- b. Pengelolaan tambang harus diikuti dengan program pasca tambang.
- c. Memberantas korupsi dengan penegakkan hukum seadil-adilnya bagi seluruh kelompok masyarakat.

Demikianlah tulisan singkat ini disampaikan, mudah-mudahan ada

manfaatnya dalam membangun
bangsa yang tercinta ini.

Jakarta, Juni 2012

DAFTAR PUSTAKA

- Dephan. Stabilitas Nasional Dinamis di Indonesia. Jakarta, 1998.
- Griffin, Ricky W. Management. U.S.A: Houghton Mifflin Company, 1997.
- Kemenko Polhukam. Sosialisasi Pancasila. Jakarta, 2008.
- Lemhannas. Modul: 1 Ketahanan Nasional. Jakarta, 2008.
- Stoner, James A.F. Management. New Jersey: Prentice Hall, Inc., 1994.